

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di era demokrasi digital saat ini, peserta didik dihadapkan pada banjir informasi politik yang sering kali dipenuhi hoaks dan polarisasi. Data Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) tahun 2024 menunjukkan bahwa 82% remaja usia sekolah menengah atas (SMA) di Indonesia terpapar konten hoaks politik melalui media sosial, yang berpotensi menurunkan kemampuan berpikir kritis mereka terhadap isu kewarganegaraan. Kondisi ini diperparah oleh rendahnya skor *civic competence* siswa Indonesia dalam survei *Programme for International Student Assessment* (PISA) 2022, dengan nilai 397—jauh di bawah rata-rata *Organisation for Economic Co-operation and Development* (OECD) sebesar 529. Akibatnya, banyak peserta didik gagal membentuk sikap politik kritis yang esensial untuk menjadi warga negara demokratis yang bertanggung jawab.

Berdasarkan hasil survei awal yang dilakukan kepada siswa SMAN 1 Kertasari, diketahui bahwa masih terdapat sebagian siswa yang memiliki tingkat kesadaran politik yang rendah. Hal tersebut terlihat dari masih minimnya ketertarikan siswa dalam mengikuti perkembangan informasi politik, baik melalui media massa maupun media digital. Selain itu, sebagian siswa juga masih mengalami keterbatasan pemahaman mengenai sistem politik, fungsi lembaga negara, serta pentingnya peran masyarakat dalam kehidupan demokrasi. Hanya sebagian kecil siswa yang menunjukkan keterlibatan aktif dalam kegiatan diskusi maupun aktivitas yang berkaitan dengan isu sosial dan politik.

Rendahnya kesadaran politik di kalangan siswa dapat disebabkan oleh beberapa faktor, seperti kurangnya minat terhadap pembahasan politik, terbatasnya ruang diskusi yang membahas isu politik secara edukatif di lingkungan sekolah, serta masih adanya pandangan bahwa politik hanya berkaitan dengan pemerintahan atau orang-orang yang memiliki jabatan tertentu. Padahal, pemahaman mengenai politik sejak usia sekolah sangat penting untuk membentuk generasi muda yang memiliki sikap kritis, peduli

terhadap lingkungan sosial, serta mampu berpartisipasi secara aktif dan bertanggung jawab dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Fenomena lain yang muncul adalah sikap tidak peduli terhadap politik di kalangan pelajar. Politik sering dianggap sebagai persaingan kekuasaan yang penuh dengan konflik, sehingga pelajar cenderung menghindari membahas atau mempelajari topik ini secara serius. Sikap ini merugikan karena membuat mereka tidak memahami bahwa politik sebenarnya terkait dengan kehidupan sehari-hari, seperti kebijakan pendidikan atau biaya sekolah. Tanpa pemahaman politik yang baik, kemampuan politik siswa akan terhambat, dan mereka cenderung menjadi pemilih yang pasif atau hanya mengikuti arus. (Rafzan, Fandy Adpen Lazzavietamsi, 2020)

Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) salah satu mata pelajaran yang bertujuan untuk membentuk warga negara yang berkompeten dan berpartisipasi aktif dalam kehidupan demokrasi (Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional). Namun, realitasnya, kesadaran politik dan partisipasi warga negara Indonesia masih rendah. Banyak warga negara yang tidak memahami hak dan kewajibannya, serta tidak memiliki sikap politik kritis terhadap kebijakan pemerintah (Survei Indikator Politik Indonesia, 2020).

Fenomena ini juga terjadi di kalangan remaja, termasuk peserta didik SMA. Banyak dari mereka yang tidak memahami isu-isu politik dan tidak memiliki sikap politik kritis (Penelitian Widyastuti, 2018). Hal ini dapat dilihat dari rendahnya partisipasi mereka dalam kegiatan politik, seperti pemilihan ketua OSIS atau pemilihan umum (Pemilu).

Sikap politik kritis sangat penting dalam membentuk warga negara yang berkompeten dan berpartisipasi aktif dalam kehidupan demokrasi. Namun, banyak faktor yang mempengaruhi konstruksi sikap politik kritis, termasuk pembelajaran PKn di sekolah (Kusuma, 2017). Pembelajaran PKn yang efektif dapat membentuk sikap politik kritis peserta didik dan meningkatkan *civic competence* mereka.

Namun, realitanya, pembelajaran PKn di sekolah masih banyak yang bersifat teoritis dan tidak kontekstual (Suryani, 2019). Banyak guru yang masih menggunakan metode ceramah dan tidak melibatkan peserta didik dalam diskusi dan analisis isu-isu politik. Hal ini dapat membuat peserta didik merasa tidak tertarik dan tidak memiliki kesempatan untuk mengembangkan sikap politik kritis mereka.

Pendidikan Kewarganegaraan mengajarkan peserta didik untuk menjadi warga negara Indonesia yang memiliki karakter bangsa. Dari hal tersebut tujuan mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan adalah untuk memberikan kompetensi-kompetensi, diantaranya yaitu mampu berpikir secara kritis, rasional dan kreatif dalam menanggapi isu kewarganegaraan. Berpartisipasi secara bermutu dan bertanggung jawab, dan bertindak secara cerdas dalam kegiatan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Dapat berkembang secara positif dan demokratis untuk membentuk diri berdasarkan pada karakter-karakter masyarakat Indonesia agar dapat hidup bersama dengan bangsa-bangsa lainnya. Dapat berinteraksi dengan bangsa-bangsa lain dalam percaturan dunia secara langsung atau tidak langsung dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.

Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) memiliki peran penting dalam membentuk warga negara yang cerdas dan bertanggung jawab. PKn tidak hanya memberikan pengetahuan teoritis tentang sistem pemerintahan, tetapi juga bertujuan membangun karakter kebangsaan dan kesadaran politik yang sehat. Melalui PKn, peserta didik dapat memahami konstitusi, hak asasi manusia, dan mekanisme partisipasi dalam kehidupan bernegara. PKn juga mengajarkan tentang hak dan kewajiban sebagai warga negara, nilai-nilai demokrasi, toleransi, dan pentingnya partisipasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Namun, efektivitas PKn dalam menumbuhkan kesadaran politik masih dipertanyakan karena pembelajaran yang cenderung teoritis dan kurang kontekstual, serta kurang melibatkan siswa dalam diskusi isu-isu politik aktual dan kegiatan praktik kewarganegaraan. (I W. Dresti Yasa, D. B. Sanjaya, 20225)

Krisis karakter di kalangan pemuda merupakan fenomena yang perlu mendapat perhatian serius guna menumbuhkan karakter yang lebih baik lagi

melalui *civic competence*. Materi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) seharusnya dapat membangun karakter peserta didik, namun realitanya masih banyak pemuda yang melakukan 5eputusa 5eputusa, seperti tawuran antar pelajar, perundungan, penyebaran ujaran kebencian, serta rendahnya partisipasi politik yang kritis. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara harapan dan realita, di mana penanaman nilai-nilai moral dan etika belum efektif. Meskipun siswa SMA mulai membangun kesadaran politik, partisipasi mereka cenderung masih pada tahap awal, sehingga tantangannya adalah mengubah sikap apatis atau ketidakpedulian menjadi keterlibatan aktif yang rasional dan bertanggung jawab.

Kompetensi kewarganegaraan (*civic competence*) 5eputu pilar utama dalam membentuk siswa yang cerdas, terampil, dan berakhlak. Kompetensi ini mencakup kemampuan untuk menyelesaikan masalah kewarganegaraan dengan tindakan yang reflektif (Banks, 1985; Budimansyah, 2008a, 2008b). Kompetensi kewarganegaraan juga digunakan sebagai acuan untuk membentuk warga negara yang baik, bermoral, dan aktif dalam masyarakat (Beny Dwi Lukitoaji & Sapriya, 2015; Branson, Margaret et al., 1994; Komalasari et al., 2008). Pembelajaran pendidikan kewarganegaraan (*civic education*) harus memenuhi empat aspek kompetensi kewarganegaraan, yaitu pengetahuan (*knowledge*), keterampilan (*skill*), sikap dan nilai (*attitude and value*), serta tindakan warga negara (*action citizen*). Untuk mencapai keempat kompetensi ini, guru diharapkan dapat menerapkan aspek-aspek tersebut dalam proses pembelajaran PKn.

Kesadaran politik generasi muda sangat penting untuk pembangunan demokrasi yang sehat dan berkelanjutan. Hal ini menjadi modal bagi keberlanjutan demokrasi suatu bangsa. Di era globalisasi yang cepat dan kompleks, peran serta aktif dan pemahaman yang mendalam tentang hak dan kewajiban warga negara menjadi krusial. Generasi muda yang sadar politik dapat berpartisipasi dalam proses demokrasi, menganalisis isu-isu publik, membuat keputusan yang bertanggung jawab, dan menjadi agen perubahan positif dalam masyarakat. (I W. Dresti Yasa, D. B. Sanjaya, 20225)

Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) memegang peranan strategis dalam menanamkan nilai-nilai demokrasi, partisipasi politik, dan tanggung jawab sosial sejak dini. PKn bertujuan membentuk warga negara yang cerdas dan bertanggung jawab, tidak hanya mentransfer pengetahuan teoritis tentang sistem pemerintahan, tetapi juga membangun karakter kebangsaan dan menumbuhkan kesadaran politik yang sehat. Melalui PKn, peserta didik dibekali dengan pemahaman akan konstitusi, hak asasi manusia, dan mekanisme partisipasi dalam kehidupan bernegara.

Namun, efektivitas PKn dalam menumbuhkan kesadaran politik masih menjadi pertanyaan, terutama ketika pembelajaran cenderung bersifat teoritis dan kurang kontekstual. Pembelajaran PKn perlu melibatkan siswa dalam diskusi isu-isu politik aktual dan kegiatan praktik kewarganegaraan di lingkungan mereka.

Guru PPKn punya peran penting dalam membentuk pemahaman politik siswa. Mereka bisa mengajarkan nilai-nilai demokrasi dan sistem politik Indonesia melalui pembelajaran di kelas dan kegiatan ekstrakurikuler. Tapi, tantangannya besar, karena harus membuat materi politik yang rumit jadi menarik dan relevan. Menurut Widiatmaka (2019), guru PPKn harus bisa menghubungkan teori dengan realitas politik, menjelaskan sistem politik Indonesia tanpa membuat siswa apatis, dan tetap netral agar pemahamannya objektif (Kartini DM, Marwah, Rasyid Ridha, 2025).

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peran *civic competence* dalam membentuk sikap politik kritis siswa SMA melalui pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn). Penelitian ini juga berupaya mengidentifikasi berbagai faktor yang memengaruhi terbentuknya sikap politik kritis siswa, baik yang bersumber dari proses pembelajaran, lingkungan sekolah, keluarga, maupun paparan media informasi. Berdasarkan temuan tersebut, penelitian ini diarahkan untuk merancang dan mengembangkan model pembelajaran PPKn yang mampu memperkuat *civic competence* sebagai landasan dalam meningkatkan sikap politik kritis dan kesadaran politik peserta didik. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian Pendidikan Kewarganegaraan, baik secara teoretis

melalui pengayaan konsep mengenai hubungan *civic competence* dengan sikap politik kritis, maupun secara praktis melalui penyediaan model pembelajaran PPKn yang efektif dalam membentuk warga negara muda yang kritis, demokratis, dan bertanggung jawab.

Manfaat teoretis dari penelitian ini adalah memperluas pemahaman tentang pendidikan kewarganegaraan dan pembelajaran PPKn, sedangkan manfaat praktisnya adalah menyediakan referensi bagi guru dan pengambil kebijakan pendidikan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran PPKn dan membentuk sikap politik kritis siswa.

Dengan demikian, penelitian ini sangat penting untuk meningkatkan kualitas pembelajaran PPKn dan membentuk sikap politik kritis siswa di SMAN 1 Kertasari, serta meningkatkan kesadaran siswa tentang pentingnya sikap politik kritis dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

B. Identifikasi Masalah

Dengan melihat permasalahan penjabaran di atas maka penulis mengidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Pembelajaran PKn di SMA Negeri 1 Kertasari belum efektif dalam membangun sikap politik kritis peserta didik.
2. Pembelajaran PKn belum mampu membentuk *civic competence* peserta didik di sekolah SMA Negeri 1 Kertasari secara optimal, sehingga mereka kurang memiliki kemampuan untuk berpartisipasi dalam proses politik dan sosial.
3. Kurangnya pengetahuan dan keterampilan guru dalam mengintegrasikan sikap politik kritis ke dalam kurikulum PKn.
4. Kurangnya kesadaran politik dan keterlibatan aktif yang rasional dan bertanggung jawab di kalangan siswa SMA Negeri 1 Kertasari

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan paparan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana konstruksi sikap politik kritis peserta didik dapat dibangun melalui pembelajaran PKn di sekolah SMA Negeri 1 Kertasari?

2. Sejauh mana pembelajaran PKn mampu membentuk sikap politik kritis melalui *civic competence* peserta didik?
3. Apa saja hambatan dan faktor pendukung dalam mengintegrasikan sikap politik kritis ke dalam kurikulum PKn untuk meningkatkan *civic competence*?
4. Apa saja penyebab kurangnya kesadaran partisipasi politik dan kesadaran politik di SMA Negeri 1 Kertasari?

D. Tujuan Penelitian

Sebagaimana latar belakang serta rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis:

1. Mengidentifikasi hambatan dan faktor pendukung dalam mengintegrasikan sikap politik kritis ke dalam kurikulum PKn untuk meningkatkan *civic competence*.
2. Menilai sejauh mana efektivitas pembelajaran PKn dalam membentuk sikap politik kritis melalui *civic competence* peserta didik.
3. Mengidentifikasi hambatan dan faktor pendukung dalam mengintegrasikan sikap politik kritis ke dalam kurikulum PKn untuk meningkatkan *civic competence*.
4. Mengidentifikasi penyebab kurangnya kesadaran partisipasi politik dan kesadaran politik di SMA Negeri 1 Kertasari.

E. Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah bersifat teoritis dan praktis. Adapun manfaat-manfaat tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini berpotensi memperluas pemahaman teoritis tentang bagaimana pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan membentuk sikap politik kritis siswa melalui *civic competence*. Dapat memperkaya teori pendidikan kewarganegaraan dan psikologi politik terkait faktor-faktor yang mempengaruhi sikap politik kritis.

2. Manfaat Praktis

- a. Hasil penelitian ini dapat menjadi acuan bagi guru dan sekolah untuk meningkatkan kualitas pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dalam membentuk siswa yang kritis dan aktif secara politik.
- b. Dapat membantu pemerintah dan pengambil kebijakan dalam mengembangkan kurikulum yang lebih efektif untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi politik siswa.
- c. Meningkatkan kesadaran guru tentang peran strategis mereka dalam membentuk generasi muda yang memiliki kesadaran politik yang tinggi.

F. Sistematika Skripsi

Berikut adalah rencana sistematika penulisan pada skripsi yang dirumuskan penulis:

BAB I: PENDAHULUAN

Terdiri dari latar belakang, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika skripsi.

BAB II: LANDASAN TEORI DAN KERANGKA PENELITIAN

Pada bab II ini penulis akan menguraikan landasan teori dari setiap variabel, kemudian memberikan gambaran terkait kerangka pemikiran terhadap penelitian.

BAB III: METODE PENELITIAN

Pada Bab III ini penulis memuat pendekatan penelitian, metode penelitian, jenis penelitian, kehadiran peneliti, instrument penelitian, sumber data, subjek penelitian dan objek penelitian, prosedur pengumpulan data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, uji keabsahan data, jadwal penelitian.

BAB IV: HASIL DAN PEMBAHASAN

Bagian ini berisi paparan data dan hasil temuan mengenai kontruksi sikap politik kritis melalui pembelajaran pkn untuk membentuk *civic competence* peserta didik

Hasil temuan yang peneliti paparkan dalam bab ini merupakan temuan peneliti di lapangan dengan menggunakan metode, pengolahan data dan analisis data yang peneliti gunakan untuk menjawab pertanyaan yang telah dirumuskan sebelumnya.

BAB V: KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bagian ini berisikan kesimpulan dan saran dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti. Kesimpulan menyajikan penafisiran dan esensi yang dilakukan oleh peneliti terhadap hasil penelitian yang telah dilakukan